BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang berkembang seperti saat sekarang ini tidak bisa dipungkiri masyarakat semakin dimudahkan dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi saat sekarang ini, terutama di bidang transportasi. Kebutuhan masyarakat akan alat transportasi memanglah sangat penting terutama kendaraan bermotor, baik masyarakat dengan strata ekonomi keatas, strata ekonomi menengah, maupun masyarakat dengan strata ekonomi kebawah. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era sekarang ini semakin dimudahkan dengan alat transportasi. Alat transportasi terutama kendaraan bermotor sangat di perlukan guna menunjang kegiatan masyarakat di bidang ekonomi itu sendiri. Misalnya guna memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan bisnis, dan berbagai aktifitas masyarakat sehari-hari lainnya. Dengan demikian dimana kebutuhan masyarakat kian bertambah akan kendaraan bermotor yang mana berdampak terhadap jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya terutama di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa total kendaraan bermotor yang masih beroperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, terhitung ditahun 2016 berjumlah 129.281.079, ditahun 2017 berjumlah 137.211.818 dan di tahun 2018 berjumlah 146.858.759. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun tersebut bahwa kendaraan bermotor yang

beroperasi terus mengalami peningkatan sekitar 13.5%.¹ Menurut Yuzrizal dalam Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, mengemukakan :

Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang lainnya pun ikut meningkat, hal ini menimbulkan kemungkinan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. Kebanyakan orang akhirnya memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor.²

Di dalam Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan bermotor, masyarakat yang tidak dapat membayar secara tunai dan lunas, sekarang lebih memilih untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran secara angsuran (kredit) yang diberikan oleh lembaga pembiayaan. Di era sekarang ini lembaga pembiayaan sedang berkembang pesat dalam memberikan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit) kepada masyarakat.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2018*, <http://www.bps.go.id/site/resultTab>, diakses pada 1 Juli 2020.

² Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, Hendro Saptono, "Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm.2

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan merupakan dasar hukum dari Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Terdapat beberapa jenis lembaga pembiayaan menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu meliputi : 1. Perusahaan Pembiayaan, 2. Perusahaan Modal Ventura, 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Penjelasan tentang Perusahaan Pembiayaan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan menurut Peraturan Menteri tersebut yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Menurut Sunaryo, mengemukakan :

Pembiayaan konsumen pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen biaya diberikan oleh perusahaan pembiayaan (*financing company*), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.³

Perkembangan mengenai lembaga pembiayaan ini sendiri sejalan dengan dikeluarkannya produk hukum berupa Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Menurut Sunaryo mengemukakan

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, cetakan ke-6, Jakarta, 2019. hlm.96

bahwa, “pembiayaan konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru”.⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rinalda Murniati dalam Sunaryo mengemukakan bahwa,

Ada 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.⁵

Lembaga pembiayaan pada dasarnya akan memberikan pinjaman dana kepada siapapun yang memiliki kemampuan. Pemberian fasilitas pembayaran secara angsuran (kredit) oleh lembaga pembiayaan (kreditur) terhadap konsumen (debitur) ini bukan tidak mungkin juga memiliki resiko yang akan timbul dikemudian hari. Maka dari itu diperlukan adanya jaminan untuk mengantisipasi resiko atau setidaknya dapat mengurangi resiko yang timbul agar kreditur tidak mengalami kerugian terhadap uang yang telah diberikan kepada debitur. Fungsi dari jaminan tersebut adalah sebagai rasa kepercayaan dan juga sebagai alat pemaksa bagi penerima jaminan (kreditur) guna mengamankan pembiayaan agar apabila ada perhitungan yang tidak sesuai yang diperjanjikan atau wanprestasi di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan asal kata Fidusia sendiri yang berasal dari kata *Fides* yang berarti “kepercayaan”. Jadi hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berlandaskan kepercayaan.

⁴ *Ibid*, hlm.102

⁵ *Ibid*, hlm.103

Didalam Perjanjian Jaminan Fidusia, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang. Antara pihak konsumen dan pihak penyedia barang terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak penyedia selaku penjual menjual barangnya kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga/atau kekurangan pembayaran akan dibayarkan oleh pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak penyedia barang dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).⁶

Menurut Miranda Nasihin, mengemukakan jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : “1.Jaminan utama, 2.Jaminan pokok, 3.Jaminan tambahan”.⁷ PT. Batavia Prosperindo Finance (selanjutnya dalam tulisan ini disebut PT. BPF) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang ada di Jambi. PT.BPF sendiri membiayai konsumen untuk kendaraan bermotor roda empat, khususnya

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti 2002, hlm.167

⁷ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, Cetakan 1, 2012, hlm.90

kendaraan bekas baik kendaraan penumpang/pribadi (*passenger*) dan kendaraan niaga (*commercial*).

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) merupakan produk hukum yang direalisasikan pemerintah sebagai perlindungan bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam jaminan fidusia. Pasal 1 UUJF memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud Fidusia yaitu “fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda”.

Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) menjelaskan mengenai benda bergerak, yang menentukan bahwa barangsiapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geld als volkomen titel*). Pembiayaan dengan jaminan fidusia ini memberikan kemudahan terhadap konsumen untuk dapat memperoleh pinjaman tetapi masih dapat menikmati dan menggunakan kendaraan bermotor tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Retno Puspo Dewi mengemukakan bahwa : “perjanjian fidusia ini bersifat *Accessoir* (ikutan) karena perjanjian fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian utang piutang.”⁸

Ketentuan pada Pasal 5 Ayat (1) UUJF menentukan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia yang

⁸ Retno Puspo Dewi, “Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia”, *Jurnal Repertorium*, Volume IV No.1, Januari-Juni 2017, hlm.75

di daftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yakni pada Kementerian Hukum dan HAM guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUJF tersebut menentukan bahwa adanya suatu kewajiban dalam pembuatan akta jaminan fidusia harus dihadapan notaris, sehingga apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta dibawah tangan maka perjanjian jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Apabila kebendaan yang akan dibebankan dengan jaminan fidusia telah didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia maka akan diterbitkan dan diserahkan kepada penerima fidusia berupa sertifikat jaminan fidusia dengan tanggal yang sama saat penerimaan permohonan pendaftaran.⁹ Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, mengemukakan :

dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung di eksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.¹⁰

Didalam suatu perjanjian fidusia ada kalanya pemberi fidusia (debitur) tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau cidera janji yang telah ia sepakati dalam perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai cidera janji telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPer, yakni berbunyi :

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan

⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.85

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000 hlm.149

lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan.

Apabila debitur lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau cidera janji, maka sesuai ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUF yang diatur lebih lanjut pada Pasal 29 Ayat (1) UUF yaitu penerima fidusia (kreditur) dapat langsung melaksanakan eksekusi secara langsung atas kekuasaannya sendiri terhadap benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia. Pada dasarnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih milik penerima fidusia (kreditur) dengan ketentuan bahwa pemberi fidusia (debitur) belum menyelesaikan kewajibannya kepada penerima fidusia (kreditur), maka dari itu sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat (1) benda yang menjadi objek jaminan langsung dapat dilaksanakan eksekusi oleh penerima fidusia (kreditur) sendiri. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan :

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 UUF adanya suatu kewajiban yang berarti diharuskannya pendaftaran atas benda yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, dengan kata lain benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia itu tidak didaftarkan maka apabila dikemudian hari tidak terlaksananya suatu yang telah

¹¹ *Ibid*, hlm.146

diperjanjikan atau wanprestasi maka eksekusi atas benda tersebut tidak dapat dilaksanakan. Menurut J. Satrio mengemukakan bahwa :

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.¹²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 mengenai uji materi terhadap Pasal 15 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan tafsir mengenai kekuatan eksekutorial yang dimaksudkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah dapat diartikan sepanjang para pihak menerima dengan sukarela pelaksanaan eksekusi dan mengakui telah melakukan wanprestasi, dan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan tafsir bahwa kondisi cidera janji harus ditentukan oleh pengadilan apabila salah seorang pihak tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji atau dengan kata lain telah terjadi kesepakatan bahwa telah terjadi wanprestasi.

Berdasarkan data penelitian awal bahwa jumlah konsumen PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi, pada tahun 2017 berjumlah 387

¹² J. Satrio, Hukum Jaminan Hak - Hak Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 97

konsumen, pada tahun 2018 ada 337 konsumen, dan pada tahun 2019 ada 288 konsumen.

Tabel 1

Debitur Pada PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi.

Tahun	Jumlah Konsumen	Benda Jaminan Fidusia yang Didaftarkan	Benda Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan	Objek Jaminan yang tidak didaftarkan yang telah dieksekusi
2017	387	290	97	4
2018	337	242	85	7
2019	288	257	31	5
Jumlah	1012	758	213	16

Sumber: PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi.

Dari data awal tersebut menunjukkan bahwa ada 16 objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh PT. BPF Cabang Jambi namun telah dilaksanakan eksekusi oleh PT. BPF Cabang Jambi tersebut, ketika objek jaminan tidak didaftarkan maka akan timbul permasalahan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan benda yang dijamin hendak di eksekusi. Pasal 11 UUFJ menentukan bahwa objek yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dihubungkan dengan uraian yang telah dijelaskan penulis diatas, maka menjadi penting untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, mengingat ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) UUFJ menentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan eksekusi melalui 3 (tiga) cara yaitu 1.pelaksanaan titel

eksekutorial, 2. penjualan benda melalui pelelangan umum, dan 3. penjualan benda dibawah tangan.

Pelaksanaan eksekusi dilakukan apabila debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terjadi apabila seorang yang berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti, mengemukakan bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam: “Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”¹³

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi, dengan judul :

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BATAVIA PROSPERINDO FINANCE CABANG JAMBI.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah hukum berbentuk skripsi ini penulis akan kemukakakan dengan judul skripsi “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi” dalam hal ini diadakan pembatasan mengenai materi yang akan penulis kemukakan

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2004, hlm. 45

agar tidak keluar dari pokok-pokok dalam permasalahan yang akan dikemukakan. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian hukum yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pada PT.Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi” adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan Pada PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi pada PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi

2. Manfaat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pemahaman serta pengalaman tentang teori hukum maupun prakteknya dilapangan yang berhubungan dengan eksekusi objek jaminan fidusia.
- b. Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat diterapkannya teori-teori dan ilmu hukum yang telah penulis peroleh selama masa studi agar dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun di kehidupan bermasyarakat nantinya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran atau interpretasi berbeda terhadap kata atau istilah yang di gunakan dalam judul skripsi ini, maka menjadi penting untuk diuraikan pengertian kata atau istilah sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia

Pengertian Jaminan Fidusia yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia

Pengertian Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Salim HS mengemukakan bahwa: “Eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia merupakan suatu usaha atau kegiatan mengambil alih benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dilakukan penjualan guna pelunasan utang tertentu. Dalam hal ini diadakan pembatasan mengenai materi agar tidak keluar dari pokok-pokok dalam penulisan ini, yang mana dalam hal ini dimaksudkan untuk membahas mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.

E. Landasan Teoritis

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu landasan teori agar penulis dapat mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mempertimbangkan definisi-definisi. Sehingga penulis menganggap penting untuk dituliskan dalam penulisan penelitian ini .

1. Teori Perjanjian

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang mana didahulukan dengan perjanjian pokok, maka penulis dalam hal ini menggunakan teori perjanjian, dalam hal ini sesuai ketentuan Pasal 4

¹⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.90

UUJF telah menentukan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Dalam Pasal 1313 KUHPer menentukan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai perjanjian ini sendiri, Subekti mengemukakan pendapatnya yakni:

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁵

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan :

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁶

Menurut Salim HS mengemukakan:

Perjanjian hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁷

¹⁵ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 1977, hlm.11

¹⁶ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.1

¹⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.27.

Menurut Abdul Kadir Muhammad mengemukakan, “Suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.”¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPer menyatakan bahwa untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan unsur-unsur pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer tersebut, Abdulkadir Muhammad mengemukakan:

Unsur pertama dan unsur kedua disebut unsur subjektif karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. Jika salah satu unsurnya tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu sah, tetapi tidak mengikat. Unsur ketiga dan unsur keempat disebut unsur objektif karena mengenai objek dan tujuan perjanjian. Jika salah satu unsurnya tidak dipenuhi, perjanjian batal.¹⁹

Dalam suatu perjanjian adakalanya debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat dikatakan cidera janji (wanprestasi) yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut I Ketut Oka Setiawan mengemukakan:

- a. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya;
- b. Tidak memenuhi prestasi;

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.6

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.304

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum itu dapat menjalankan fungsinya.²¹

Menurut Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa:

Hukum adalah sebuah norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, aturan-aturan itu dapat menjadi batasan bagi masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu. Dengan adanya pelaksanaan aturan-aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.²²

Menurut Cst Kansil mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²³

Menurut Utrecht dalam Riduan Syahrani mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum mengandung dua makna, yaitu pertama: adanya aturan-aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua: berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.19

²¹ Domiskus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.108

²³ Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 385

dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Menurut Gustaf Radbruch dalam R. Tony Prayogo mengemukakan bahwa:

Ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.²⁵

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, sebagaimana dikutip oleh R. Tony Prayogo, mengemukakan bahwa “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman bagi semua orang”.²⁶

F. Metode Penelitian

Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini akan penulis lakukan di PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi yang beralamat di Jalan Sultan

²⁴ Ridhuan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²⁵ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 02, 2016 hlm.192

²⁶ *Ibid.*

Agung No. 08 RT.07 Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.

2. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution mengemukakan, “Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.”²⁷

Metode penelitian yuridis empiris ini dilakukan untuk mempelajari kesenjangan hukum yang terjadi antara harapan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*) yaitu meneliti bagaimana pelaksanaannya (realisasi) yang terjadi di masyarakat serta penerapan peraturan-peraturannya.

3. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yakni merupakan penelitian yang menjelaskan secara menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Menurut Sujarweni V. Wiratna mengemukakan: “populasi merupakan keseluruhan jumlah yang didalamnya terdapat objek atau

²⁷ *Ibid*, hlm.135

subjek yang mempunyai ciri-ciri dan kualitas tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk di teliti dan di tarik kesimpulannya.”²⁸ Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah debitur PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi dari tahun 2017-2019 sejumlah 1012 orang.

b. Sampel

Tata cara pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*, Menurut Rony Hanintjo mengemukakan bahwa: “*Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau alasan terlebih dahulu”.²⁹ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dari beberapa sampel debitur yang objek jaminan fidusianya tidak didaftarkan dan telah dilakukan eksekusi yakni sebanyak 5 orang debitur.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan-bahan guna penulisan skripsi, penulis dalam hal ini mengumpulkan data melalui:

a. Data Primer, meliputi:

Penulis mendapatkan data langsung dari narasumber/responden atau pihak-pihak yang dianggap mengetahui mengenai masalah yang akan diteliti (informan) yaitu pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi dan Konsumen yang objek jaminan fidusianya telah di eksekusi.

²⁸ Sujarweni V. Wiratna, *Metode Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hlm.80

²⁹ Rony Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.51

b. Data Sekunder, meliputi:

Data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan yang menunjang kelengkapan dari data primer, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- 5) Buku-Buku dan literatur ilmiah;
- 6) Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara langsung dari subjek penelitian yaitu karyawan PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi dan konsumen (sampel penelitian) yaitu debitur yang objek jaminan fidusianya telah di eksekusi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari materi-materi yang terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara *kualitatif*, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara *kualitatif* untuk mencapai kejelasan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut Sujarweni V. Wiratna mengemukakan bahwa: “Analisa data *kualitatif* merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yakni apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”³⁰ Dari hasil analisis tersebut selanjutnya kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan yang bertujuan agar dapat menjadi bahan acuan dalam penulisan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mempermudah dalam melakukan penulisan serta dapat terlihat sistematis dan terstruktur. Dalam penyusunan

³⁰ Sujarweni V. Wiratna, Op.Cit, hlm.20

skripsi ini terdapat 4 (empat) bab, yang mana tiap-tiap bab tersebut terdapat sub-sub bab, yaitu seperti berikut:

BAB I Pendahuluan Dalam Bab ini penulis akan menguraikan suatu keadaan atau gambaran secara umum dari penelitian yang akan penulis buat dan di dalamnya berisi uraian-uraian seperti: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang apa itu jaminan fidusia mulai yakni pengaturan jaminan fidusia, ruang lingkup fidusia, pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, pengalihan jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia serta eksekusi jaminan fidusia.

BAB III Pembahasan Dalam ini penulis akan menguraikan dan memaparkan data dari hasil penelitian serta menganalisa permasalahan yang penulis kemukakan dalam rumusan masalah, selain itu juga dalam Bab ini akan penulis uraikan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap eksekusi objek jaminan fidusia pada PT. Batavia Proseperindo Finance Cabang Jambi dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT. Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi.

BAB IV Penutup Dalam ini berisi suatu kesimpulan yang ditarik berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dan dalam bab ini juga berisi saran-saran dari penulis yang dianggap perlu.